



Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dengan Inkuiri Reflektif dalam Konteks Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Pertama

Ririk Novembri^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo, Indonesia

¹ ririkpkn2012@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2022;
Revised: 12 Januari 2022;
Accepted: 20 Januari 2022.

Kata-kata kunci:

Penerapan Nilai-nilai
Pancasila;
Pembelajaran PPKn;
Inkuiri Reflektif.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dengan studi pustaka. Peneliti menganalisis konten dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, selanjutnya diperkuat dengan analisis wacana konstruktif. Hasil penelitian menemukan, pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila ditentukan oleh beberapa indikator: (1) nilai Ketuhanan yaitu peserta didik membaca ayat suci Al-Quran; setiap pagi peserta didik mengerjakan sholat dhuha; (2) nilai kemanusiaan: peduli kalau melihat temannya sedang mengalami kesulitan; (3) nilai Persatuan saat upacara bendera yang dilaksanakan dengan hikmat; kegiatan pramuka; lomba-lomba waktu class meeting; sudah banyak yang hapal Pancasila dengan diterapkannya membaca Pancasila sebelum pelajaran dimulai; (4) nilai Kerakyatan: peserta didik mempunyai keberanian untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahaminya; (5) implementasi nilai Keadilan. Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dikembangkan dengan menggunakan interpretasi maksimal tradisi inkuiri reflektif karena ia akan menjadi lebih memiliki kekuatan dan lebih fungsional untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia.

ABSTRACT

Application of Pancasila Values with Reflective Inquiry in the Context of Civics Learning in Junior High Schools. This study aims to describe efforts to apply Pancasila values in the context of learning Pancasila and Citizenship Education in Junior High Schools. This study uses the method of literature study. Data obtained by literature study. Researchers analyzed content from various sources that had been collected, further strengthened by constructive discourse analysis. The results of the study found, first, the application of Pancasila values is determined by several indicators: (1) the value of God, namely students reading the holy verses of the Koran; every morning students do Duha prayer; (2) Human values: cares when he sees his friend in trouble; (3) the value of Unity during the flag ceremony which is carried out with wisdom; scout activities; competitions during class meetings; many have memorized Pancasila with the implementation of reading Pancasila before the lesson begins; (4) Populist values: students have the courage to ask the teacher about material they don't understand; (5) implementation of the value of Justice. Second, Citizenship Education in Indonesia is developed using the maximum interpretation of the reflective inquiry tradition because it will become more powerful and more functional to develop democracy in Indonesia.

Keywords:

Implementation of
Pancasila Values;
Civic Education
Learning;
Reflective Inquiry.

Copyright © 2022 (Ririk Novembri) All Right Reserved

How to Cite : Novembri, R. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dengan Inkuiri Reflektif dalam Konteks Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Pertama. *Mindset : Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(1), 23–29. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/mindset/article/view/1124>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dengan keberagaman suku di dalamnya (Annurua, & Nurani, 2019). Keberagaman lainnya yaitu keyakinan dan agama pun menambah keindahan Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bingkai persatuan dan kesatuan. Ada upaya dari setiap warga negara untuk persatuan dan kesatuan itu melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Minarso, & Najicha, 2022).

Internalisasi Pancasila dan Nasionalisme dari Masa ke Masa Pancasila sebagai ideologi negara telah disepakati oleh the pendiri bangsa sejak tahun 1945. Namun nilai-nilai Pancasila tidak berarti telah serta merta terinternalisasi dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan, untuk beberapa lama, Pancasila sepertinya hanya menjadi ungkapan simbolis kenegaraan tanpa jelas implementasinya, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Penafsiran Pancasila pun kadang menjadi bermacam-macam tergantung golongannya bahkan tergantung pada arus politik yang berkuasa. Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1960-an, dalam pembangunan karakter bangsa (Prasetiawati, 2017).

Upaya ini dilakukan untuk meng-Indonesiakan orang Indonesia yang disesuaikan dengan visi dan misi politik penguasa pada masa itu. Oleh karena itu, bahan-bahan yang diberikan pun bukan hanya tentang Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga bahan-bahan yang berisi pandangan politik penguasa masa itu. Upaya menggelorakan semangat nasionalisme sangat tinggi, sehingga oleh Azyumardi Azra dipandang sebagai fase kedua tumbuhnya nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pada masa ini, upaya *nation and character building* ini bukan hanya untuk masyarakat luas pada umumnya, namun juga dilakukan melalui jalur pendidikan formal, misalnya melalui mata pelajaran Civics. Sejarah mencatat, bahwa pada periode selanjutnya, yakni pada masa Orde Baru, apa yang dilakukan oleh rezim Orde Lama itu (Pujiarti, Suhertina, Ardian, & Rahmadani, 2021).

Tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya perlu memperluas misinya dari sekedar pendidikan politik. Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut: pertama, PKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada peserta didik agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekakan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi. Kedua, PKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri peserta didik (Ramdhani, 2017).

Ketiga, PKn sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti melalui PKn diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme peserta didik, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Keempat, PKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina peserta didik sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. Kelima, PKn sebagai pendidikan multikultural yang berarti PKn diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan sikap toleran peserta didik untuk hidup dalam masyarakatnya yang multikultural (Prasetiawati, 2017).

Keenam, PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*), yang berarti PKn membina peserta didik dan mahapeserta didik untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dengan melihat misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang demikian luas, maka tujuan PKn pun perlu lebih diperluas pula. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) secara teoritis adalah untuk mendidik para peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang

demokratis. Dalam penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apa yang dimaksudkan atau ditujukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut undang-undang itu ternyata sangat sederhana, yang hanya memuat dua kompetensi yang harus dimiliki warga negara, yakni rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Rohendi, 2016).

Dalam kaitannya dengan upaya membina peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, para peserta didik harus mampu memecahkan masalah mereka sendiri dan masalah masyarakatnya, termasuk memecahkan masalah konflik antarpribadi dan antarkelompok, dalam cara yang damai dan demokratis. Parker (1996:12) mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada banyak kemungkinan bagi peserta didik untuk mengalami hidup dalam demokrasi yang nyata di lingkungan sekolah mereka, seperti di kelas yang heterogen, di tempat bermain, di ruangan olah raga dan pada kegiatankegiatan ekstrakurikuler. Dalam situasi seperti ini, Pendidikan Kewarganegaraan dapat memainkan peran dalam mendidik peserta didik untuk terlibat dalam memecahkan masalah termasuk masalah-masalah konflik pada kehidupan sekolah dan kehidupan sosial sehari-hari.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan memahami terlebih dahulu duduk permasalahan, membaca, dan menganalisa berbagai nilai-nilai yang terdapat pada proses pembelajaran di sekolah. Sumber primer berasal dari artikel jurnal, buku dan penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian. Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Pada penelitian ini peneliti melakukan beberapa tahapan dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Hal ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai sumber, mengategorisasi sumber sesuai dengan struktur bahasan penelitian yang telah ditentukan, memilih informasi yang kredibel, menganalisis konten dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, selanjutnya diperkuat dengan analisis wacana.

Hasil dan Pembahasan

Warga Negara Indonesia adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah Indonesia dan harus tunduk dan patuh pada aturan serta norma-norma yang berlaku. Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara seimbang karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup mereka dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini perlu diajarkan kepada setiap Warga Negara Indonesia sejak usia dini melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) agar mereka dapat mengetahui, memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tentang hak dan kewajiban saja yang diajarkan. Namun, juga meliputi wawasan kebangsaan (Sanusi, 1999; Santoso: 2005).

Menurut Depdiknas (2003) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila (Kemendikbud : 2017). Selain itu, melalui penyempurnaan PKn menjadi PPKn tersebut terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi serta solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional (Haris, 2017).

PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan global Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selain harus meneguhkan keadaban Pancasila juga harus membekali peserta didik untuk hidup dalam kancah global sebagai warga dunia (global citizenship). Oleh karena itu, substansi dan pembelajaran PPKn perlu diorientasikan untuk membekali warga negara Indonesia agar mampu hidup dan berkontribusi secara optimal sesuai dinamika kehidupan abad 21. Untuk itu, pembelajaran PPKn selain mengembangkan nilai dan moral Pancasila, juga mengembangkan semua visi dan keterampilan abad ke-21 sebagaimana telah menjadi komitmen global.

Visi misi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 indikator keberhasilan sistem pendidikan nasional khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini diperlukan untuk: (1) menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani oleh bangsa lain; (2) mempererat persatuan dan kesatuan, baik dalam spirit maupun geografi. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic commitment, and civic responsibility); (2) pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge); (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility).

Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut, sehingga peserta didik mampu: (1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial; (2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negarasesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial kultural.

Dengan demikian PPKn lebih memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut: (1) PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan civic education di USA, citizenship education di UK, *talimatul muwatanah* di negara-negara Timur Tengah, education civicas di Amerika Latin; (2) PPKn sebagai wahana pendidikan nilai,

moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003. Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), meliputi: (1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa; (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia; (4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendukung tumbuh kembang wawasan kebangsaan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka perlu ditentukan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut. Indikator tersebut, antara lain: (1) penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; (2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan berdaulat; (3) cinta akan tanah air dan bangsa; (4) demokrasi atau kedaulatan rakyat; (5) kesetiakawanan sosial; (6) masyarakat adil dan makmur. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendukung tumbuh kembang wawasan kebangsaan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sudah terlihat antara lain: (1) implementasi nilai Ketuhanan: setiap hari peserta didik membaca ayat suci Al-Quran; setiap pagi peserta didik mengerjakan sholat dhuha (2) implementasi nilai Kemanusiaan: peduli kalau melihat temannya sedang mengalami kesulitan dan kesusahan dengan menyumbang ataupun menjenguk temannya yang mengalami musibah; menjenguk temannya yang sakit, saling menyayangi dengan temannya, sopan kalau berbicara guru dan teman (3) implementasi nilai Persatuan: upacara bendera yang dilaksanakan dengan hikmat; kegiatan pramuka; lomba-lomba waktu *class meeting*; sudah banyak yang hapal Pancasila dengan diterapkannya membaca Pancasila sebelum pelajaran dimulai (4) implementasi nilai Kerakyatan: peserta didik mempunyai keberanian untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahaminya; peserta didik juga berani untuk menanggapi apa yang diajarkan oleh guru (5) implementasi nilai Keadilan: dalam penerimaan peserta didik baru sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan karena uang yang lebih besar dari yang lainnya seseorang peserta didik itu diterima.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mesti dikembangkan dengan menggunakan interpretasi maksimal, karena ia akan menjadi lebih memiliki kekuatan dan lebih fungsional untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan interpretasi maksimal dan melalui tradisi reflektif inkuiri, Pendidikan Kewarganegaraan sekarang lebih diharapkan mampu memecahkan problema implementasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme secara lebih kritis dan demokratis. Meskipun banyak ahli pendidikan memandang bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mendidik para peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, namun tidak semua negara mempunyai tingkat minat yang sama untuk mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Rowe (2000), pada banyak negara Pendidikan Kewarganegaraan tetap opsional, terfragmentasi, sumber daya yang buruk, kekurangan dasar teori dan diajar oleh guru yang enggan atau kurang terlatih. Kondisi seperti ini terjadi juga pada Pendidikan kewarganegaraan selama ini di Indonesia, sebagaimana digambarkan oleh Somantri (2001) dan Winataputra (1999, 2002). Masalah ini tentu saja menggambarkan suatu tantangan dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Simpulan

Penelitian ini memberi simpulan bahwa pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila ditentukan oleh beberapa indikator: (1) nilai Ketuhanan yaitu peserta didik membaca ayat suci Al-Quran; setiap pagi peserta didik mengerjakan sholat dhuha; (2) nilai Kemanusiaan: peduli kalau melihat temannya sedang mengalami kesulitan; (3) nilai Persatuan saat upacara bendera yang dilaksanakan dengan hikmat; kegiatan pramuka; lomba-lomba waktu *class meeting*; sudah banyak yang hapal Pancasila dengan diterapkannya membaca Pancasila sebelum pelajaran dimulai; (4) nilai Kerakyatan: peserta didik mempunyai keberanian untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahaminya; (5) implementasi nilai Keadilan. Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dikembangkan dengan menggunakan interpretasi maksimal tradisi inkuiri reflektif karena ia akan menjadi lebih memiliki kekuatan dan lebih fungsional untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia.

Referensi

- Annurua, Q. A., & Nurani, F. (2019). Tanggung Jawab dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. *Jurnal SSBI Universitas Brawijaya*, 1-5.
- Haris, A. H. (2017). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 64-82.
- Hasan, M. A. K. (2016). Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 66-77.
- Hasanah, U. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Millennial Untuk Membendung Diri Dari Dampak Negatif Revolusi Industri 4.0. *Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 52-59.
- Idrus Ruslan. (2015). Penguatan Ketahanan Budaya Dalam Menghadapi Derasnya Arus Budaya Asing. *Jurnal TAPIs*, 11(1).
- Ismail, S. (2020). Penanaman Nilai Inti Pendidikan Karakter Berlandaskan Pancasila Pada Peserta Didik Di Sekolah. *Jurnal Penelitian Agama*, 21(1), 157-172.
- Isnaini, M. (2013). Internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di madrasah. *Al-Ta Lim Journal*, 20(3), 445-450.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Permendikbud RI No 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada satuan Pendidikan Formal. 8–12.
- Kurniawan, M. I. (2015). Tri pusat pendidikan sebagai sarana pendidikan karakter anak sekolah dasar. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 41-49.
- Maftuh, B. dan Sapriya. (2004). "Pembelajaran PKN melalui Peta Konsep," dalam *Jurnal Civicus*, Jurusan PKN FPIPS UPI.
- Maunah, B. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Peserta didik. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1, 90–101. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>
- Megawangi, R. (2010). Pengembangan program pendidikan karakter di sekolah: pengalaman sekolah karakter. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation (IHF).
- Miftah Nurul Annisa, Ade Wiliyah, N. R. (2020). Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Dasar di Zaman Serba Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(1), 35–48.
- Minarso, I. P., & Najicha, F. U. (2022). Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Untuk Melawan Globalisasi. *Jurnal kewarganegaraan*, 6(1), 543-551.
- Nurizka, R., & Rahim, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membentuk Karakter Peserta didik Melalui Budaya Sekolah. *Elementary School*, 7(1), 38-49.
- Parker, W. C. (Ed.). (1996). *Educating the Democratic Mind*. Albany, New York: State University of New York Press.
- Rowe, D. 2000. "Value pluralism, democracy and education for citizenship," dalam *Politics, Education and Citizenship*, Vol. VI (Eds, Leicester, M., Modgil, C. dan Modgil, S.). London and New York: Falmer Press.
- Pebriani, Y. N., & Dewi, D. A. (2022). Peran Guru Dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Peserta didik Sekolah Dasar Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1432-1439.
- Prasatiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272-303.

- Pujiarti, R., Suhertina, S., Ardian, M. R., & Rahmadani, N. N. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Peserta Didik di Era Globalisasi. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 2(1), 24-28.
- Ramdhani, M. A. (2017). Lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 28-37.
- Rohendi, E. (2016). Pendidikan karakter di sekolah. *EduHumaniora| Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 3(1).
- Sanusi, A. (1999). Model Pendidikan Kewarganegaraan Negara Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial. Makalah yang dipresentasikan pada Conference on Civic Education for Civil Society, di Bandung 16-17 Maret 1999.
- Somantri, N. M. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suneki, S. (2012). Dampak globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah. *CIVIS*, 2(1).
- Wadu, L. B., Gultom, A. F., & Pantus, F. (2020). Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 80-88.
- Wahab, A. A. (1996). Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia menuju Warganegara Global. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada IKIP Bandung.
- Winataputra, U. S. (1999). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi di Indonesia. Paper disampaikan pada Workshop on the Development of Concepts and Content of Civic Education for Indonesian Schools, 16- 19 Oktober 1999 di Bandung